

**INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT
PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

AGASTI MUKAROMAH
B200 080 006

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca skripsi dengan judul:

**INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT
PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH**

Yang ditulis oleh:

AGASTI MUKAROMAH
B 200 080 006

Penandatanganan berpendapat bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat
untuk diterima.

Surakarta, September 2012

Pembimbing

(Dra. Mujiyati, M.Si.)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, SE, M.Si.)

INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

**AGASTI MUKAROMAH
B200 080 006**

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi Pajak Penghasilan menurut Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pajak penghasilan menurut kacamata fiskus.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi interpretatif, dimana peneliti mencoba melihat bagaimana Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta menginterpretasikan pajak dan implikasinya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Surakarta. Dalam penelitian ini jumlah informan yang akan diwawancarai tidak dapat ditentukan jumlahnya karena pengumpulan sampelnya menggunakan cara *judgment*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi: survei pendahuluan, survei kepustakaan, dan pengumpulan data lapangan. analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, meliputi: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta memiliki interpretasi yang baik terhadap kewajibannya membayar pajak penghasilan, Kewajiban membayar pajak memberikan implikasi yang mengarah pada suatu kerepotan dan menambah beban wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap pengenaan pajak penghasilan sudah cukup bagus, namun ada juga UMKM yang merasa keberatan jika sebagian harta mereka digunakan untuk membayar pajak.

Kata kunci : Intrepretasi pajak, Implikasi pajak, Para Wajib Pajak usaha mikro, kecil, dan menengah.

A. PENDAHULUAN

Selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu bertahan dikala deburan ombak. Usaha mikro, kecil dan menengah ibarat sebuah pioner bangsa yang mampu menjelma sebagai dewa penyelamat disaat keterpurukan terjadi.

Dari tahun ke tahun jumlah UMKM semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (DJP, 2009).

Penelitian ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Mutiah, Gita Arasy Harwida & Fitri Ahmad Kurniawan (2011) yaitu untuk mengetahui Interpretasi Pajak dan Implikasinya menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini akan menganalisa seberapa besar pengetahuan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pajak dan implikasinya.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui interpretasi pajak penghasilan menurut Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap dunia perpajakan khususnya pajak penghasilan menurut kacamata fiskus.

B. LANDASAN TEORI

Interpretasi

Interpretasi adalah suatu proses untuk menyederhanakan ide-ide atau isu-isu yang rumit dan kemudian membaginya dengan masyarakat awam/umum. Suatu interpretasi yang baik adalah suatu interpretasi yang dapat membangun

hubungan antara audiens dengan obyek interpretasi. Apabila dilakukan secara efektif, interpretasi dapat digunakan untuk meyakinkan orang lain, dapat mendorong orang lain untuk merubah cara berpikir dan tingkah laku mereka.

Pajak

Dalam UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Implikasi Pajak

Implikasi dari adanya pajak bagi WP UMKM memberikan dampak atau implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan, mereka merasa banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan (Mutiah, 2011).

Perspektif Wajib Pajak terhadap implikasi pajak dipengaruhi beberapa faktor yang melatarbelakangi, diantaranya (Ferry, 2006):

1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

2. Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

3. Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak

Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh Wajib Pajak.

4. Sikap Optimis Wajib Pajak terhadap pajak

Sikap optimis Wajib Pajak terhadap pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak khawatir akan rugi atau tidak untung dari Wajib Pajak terhadap pajak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.20 Tahun 2008 pasal 1, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha mikro :

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.20 Tahun 2008 pasal 1, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Kecil:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam UU no.20 Tahun 2008 pasal 1, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha menengah:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi interpretatif, studi interpretatif lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat bagaimana Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Surakarta menginterpretasikan pajak dan implikasinya terutama pajak penghasilan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Surakarta. Peneliti memilih wilayah Surakarta karena Surakarta terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Sumber Data

Oleh karena lingkup penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan sampelnya menggunakan cara *judgement*, yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Informan

Informan penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta dan Petugas di KPP Pratama Surakarta dengan kriteria:

- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tercatat sebagai Wajib Pajak (pembayar pajak) di KPP Pratama Surakarta.
- b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang usahanya masih aktif.
- c. Petugas KPP yang menguasai permasalahan yang diteliti.

2. Dokumentasi, dalam penelitian ini dokumentasi digali melalui berbagai tulisan, baik tulisan yang berupa laporan hasil penelitian sebelumnya yang membahas persoalan yang sama, dokumen dan arsip-arsip, buku-buku dan artikel

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi (Mutiah, 2011):

1. Survei pendahuluan

Berupa menggali informasi-informasi *up-to date* baik melalui artikel, internet, media cetak, dan lainnya untuk memperoleh gambaran tentang UMKM dan memahami permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini.

2. Survei kepustakaan

Berupa kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data jadi yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal maupun aturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan teori-teori yang mendukung.

3. Pengumpulan data lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara, rekaman dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, dalam observasi tersebut peneliti melakukan wawancara secara mendalam guna memperoleh informasi yang terkait dengan tujuan penelitian

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif, data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Data tersebut mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyutungan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Tahap-tahap interaktif dalam analisis data ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan/verifikasi, pada penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang pemahamannya terhadap pajak penghasilan diperoleh data sebagai berikut:

Informan 1: *Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dan pembayaran yang diterima oleh wajib pajak sehubungan dengan usaha yang dilakukan.*

Informan 2: *Pajak penghasilan adalah pajak terhadap segala pendapatan dan keuntungan yang diperoleh atas pekerjaan, usaha, atau kegiatan lainnya.*

Informan 3: *Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak baik orang maupun badan yang memperoleh pembayaran atau keuntungan dari pekerjaan atau usahanya.*

Pendapat responden mengenai Pajak Penghasilan menunjukkan bahwa atas penghasilan berupa pendapatan, pembayaran, dan keuntungan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan usahanya.

Pendapat ketiga informan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyatakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh UU PPh.

Berkaitan dengan adanya kewajiban membayar pajak bagi Warga Negara Indonesia salah satunya UMKM, maka kewajiban membayar pajak itu pasti

akan membawa dampak atau implikasi. Implikasi yang ditimbulkan dapat berupa implikasi positif maupun implikasi negatif. Menurut UMKM beberapa dampak atau implikasi yang dirasakan karena adanya kewajiban membayar pajak adalah sebagai berikut:

Informan 1: *“Jika kita patuh membayar pajak kita jadi mudah mengurus perijinan, dapat menjadi syarat pengajuan kredit ke bank, dan dampak tidak langsungnya adalah negara menjadi lancar dan ekonomi lancar”*.

Informan 2: *“Sebenarnya pajak itu membuat repot dan memberatkan tapi mau gimana lagi wong itu kewajiban ya harus dibayar. Saya tidak begitu paham teknis pembayarannya sehingga saya dibantu oleh petugas KPP. Yang penting bagi saya usaha lancar.”*

Informan 3: *“Urusan pajak menambah pekerjaan, dari pengisian SPT, pelaporannya, dan pembayarannya. Meskipun berat ya harus dilaksanakan, ini agar negara ini masih bisa jalan dan usaha saya juga bisa jalan dengan lancar*

Dari pernyataan ketiga informan di atas, tampaknya dengan adanya pajak memberikan dampak atau implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan dan menambah beban pekerjaan, mereka merasa banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan. Hal ini mungkin, karena manfaat yang ditimbulkan dari adanya pajak itu tidak secara langsung dapat mereka rasakan, sehingga paradigma yang muncul adalah sesuatu yang cenderung berkonotasi negatif. Meskipun demikian wajib pajak UMKM sadar bahwa membayar pajak sudah menjadi bagian dari kewajibannya karena memiliki usaha. Kesadaran atas kewajiban ini merupakan poin positif menuju kesadaran membayar pajak.

Sebagai upaya konfirmasi atas pemahaman wajib pajak terhadap pajak penghasilan ditinjau dari kacamata petugas pajak, maka dilakukan wawancara dengan pihak fiskus yang hasilnya sebagai berikut:

Informan 4 (fiskus) menyatakan *“Sebenarnya semua wajib pajak sudah memahami tentang pengenaan pajak terhadap usaha mereka. Hanya terkadang mereka merasa berat harus mengeluarkan uang untuk dibayarkan.*

Padahal di kemudian hari pembayaran pajak tersebut bermanfaat langsung bagi wajib pajak dalam mengurus perijinan dan perbankan.”

Menurut pegawai pajak (fiskus) tingkat pemahaman UMKM cukup bagus, namun ada juga UMKM yang merasa keberatan jika sebagian harta mereka digunakan untuk membayar pajak. Untuk mengatasi hal demikian, pegawai pajak (fiskus) dapat lebih proaktif mendekatkan diri dan merangkul UMKM agar mau membayar pajak dengan melakukan sosialisasi yang lebih intens.

E. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta memiliki interpretasi yang baik terhadap kewajibannya membayar pajak penghasilan. Interpretasi wajib pajak terhadap pajak hampir sudah mengena terhadap substansi dari pajak yaitu sebagai sebuah kewajiban.
2. Kewajiban membayar pajak memberikan implikasi yang mengarah pada suatu kerepotan dan menambah beban wajib pajak. Meskipun demikian wajib pajak UMKM sadar bahwa membayar pajak sudah menjadi bagian dari kewajibannya karena memiliki usaha. Wajib pajak menyadari bahwa kewajibannya membayar pajak dapat bermanfaat secara tidak langsung kepada usahanya.
3. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap pengenaan pajak penghasilan sudah cukup bagus, namun ada juga UMKM yang merasa keberatan jika sebagian harta mereka digunakan untuk membayar pajak.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian berikutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian tentang pemahaman wajib pajak tentang pajak dan sistem perpajakan.

2. Bagi peneliti berikutnya hendaknya menambah jumlah sampel dan memperluas daerah penelitian sehingga tidak hanya terbatas pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta saja agar tingkat generalisasinya lebih baik dan hasil penelitian dapat mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2009 <http://www.pajak.go.id> diunduh tanggal 18 Desember 2011
- Ekawati, Liana dan Radianto, Dwi EW. 2008. *Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta*. Jurnal Terakreditasi Teknologi dan Manajemen Informatika Vol:6 Edisi Khusus: 185-190 <http://www.ISSN.com> diunduh tanggal 18 Desember 2011
- <http://www.keuanganlsm.com/article/perpajakan/kepatuhan-wajib-pajak/> diunduh terakhir 18 Desember 2011
- <http://www.kamusbesar.com/29984/perspektif> diunduh tanggal 10 April 2012
- Joko. 2003. Interpretasi dan Pemahaman dalam Proses Alkulturasasi Sosial. Kumpulan Penelitian Sosiologi dan Bahasa. <http://www.journal.ccs.soston.ac.uk> diunduh tanggal 18 Desember 2011
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi 2011. Yogyakarta: ANDI
- Mudji, Fransisca. 2005. Interpretasi dan Hakekat Penafsiran dalam Menggali Makna. On- line at <http://www.wikipedia/wiki/interpretasi> diunduh tanggal 18 Desember 2011
- Mujiyati. 2008. *Perpajakan*. Edisi 1. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Mutiah Mutiara, Gita Arasy Harwida & Fitri Ahmad Kurniawan. 2011. *Interpretasi Pajak dan Implikasinya menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sebuah Studi Interpretif)*. Simposium Nasional Indonesia XIV Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 21-22 Juli 2011

- Prasetyo, Ferry Dwi. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil dan Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di daerah Jogjakarta*. Skripsi
- Pudyatmoko, Sri. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset
- Purwono, Herry. 2011. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 *mengenai perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai *Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*.
- Santoso Wahyu. 2008. *Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan Indonesia di Indonesia)*. Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Oktober 2008
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Tarjo dan Indra Kusumawati. 2005. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan. JAAI Volume 10 No. 1, Juni 2006: 101 – 120
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku I Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Yahya, Abas. 2009. Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). www.LubukLinggau.go.id. Diakses 20 Juni 2012